



Pendampingan Penyusunan Perencanaan Strategis Wilayah Berbasis Partisipasi Berdasarkan Potensi dan Kerentanan Wilayah Pesisir Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung

Aulia Rahmawati¹, Fritz Akhmad Nuzir², Kustiani², Aditya Mahatidanar², Okta Ainita³,
M Denu Poyo¹

¹*Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Bandar Lampung*

²*Faculty of Engineering, Universitas Bandar Lampung*

³*Faculty of Law, Universitas Bandar Lampung*

Correspondence author: Aulia Rahmawati

Email: aulia@ubl.ac.id

Address : Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia, Telp. 085279797164

DOI: <https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v6i4.963>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

Introduction: Urban coastal areas possess significant development potential but also face various development challenges. Pesawahan Village, Bandar Lampung City, is one of the coastal areas that has considerable local economic potential, strong social capital, and opportunities for community-based tourism development. However, environmental, social, and economic problems remain major obstacles to achieving sustainable regional development. Community involvement in the development planning process is essential to ensure that development programs are formulated in accordance with local needs and regional characteristics

Objective: This community service program aimed to enhance community capacity in preparing participatory strategic regional planning by integrating the potentials and vulnerabilities of coastal areas as the basis for determining development priorities in Pesawahan Village, Bandar Lampung City.

Method: The community service activities were carried out using a participatory approach through field observations, Focus Group Discussions (FGDs), participatory mapping, training sessions, and community mentoring.

Result: The assistance program successfully identified the existing conditions of the study area, including environmental infrastructure issues, tidal flood vulnerability, local economic potential, tourism potential, and the capacity of community institutions. Through Focus Group Discussions (FGDs) and participatory mapping, community members successfully developed maps of regional potentials and vulnerabilities, which served as the basis for preparing the strategic regional planning document. In addition, the community formulated several development priorities, including drainage improvement, environmental enhancement, the development of UMKM, and

community-based tourism development. These outputs were compiled into a participatory regional action plan document containing analyses of local potentials, regional vulnerabilities, and development priorities, which serves as a reference for sustainable development in the coastal area.

Conclusion: Assistance in the preparation of participatory strategic regional planning was effective in enhancing community capacity and participation in local development planning processes. The integration of regional potential identification, coastal vulnerability analysis, and participatory action plan formulation contributed to the development of planning directions that better reflect community needs. Furthermore, the program strengthened community commitment to supporting inclusive, adaptive, and sustainable development in coastal areas.

Keywords: participatory planning; coastal areas; community empowerment; strategic regional planning.

Latar Belakang

Kawasan pesisir perkotaan menghadapi tekanan multidimensional yang kompleks, meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Kawasan pesisir secara global diakui sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta tekanan urbanisasi yang pesat (UN-Habitat). Dalam konteks lokal Provinsi Lampung, Kelurahan Pesawahan merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, yaitu mencapai 12.654 jiwa/km² dengan jumlah penduduk 11.841 jiwa (Lampung, 2024), sehingga memicu tekanan signifikan terhadap daya dukung lingkungan dan kualitas permukiman. Kondisi geografis yang berada di wilayah pesisir serta berdekatan dengan aliran sungai memperbesar potensi terjadinya banjir rob dan banjir musiman yang terjadi secara periodik. Fenomena ini diperparah oleh buruknya sistem drainase, pendangkalan sungai, serta kerusakan infrastruktur penahan air, yang menunjukkan adanya persoalan tata kelola lingkungan yang belum optimal. Menurut Adger (2006) kerentanan wilayah pesisir tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik, tetapi juga oleh kapasitas adaptif masyarakat dalam merespons risiko. Secara empiris kondisi Pesawahan tidak hanya mencerminkan kerentanan ekologis, tetapi juga menunjukkan lemahnya kapasitas sosial dalam pengelolaan risiko dan perencanaan pembangunan berbasis keberlanjutan.

Dimensi sosial dalam pembangunan wilayah Pesawahan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi modal sosial dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat memiliki aktivitas kolektif seperti kegiatan gotong royong dan program kebersihan lingkungan, namun kegiatan tersebut masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam kerangka perencanaan yang sistematis. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan perencanaan wilayah juga masih tergolong rendah. Terdapat kegiatan rutin warga seperti "gebrak sungai", kegiatan tersebut berjalan tanpa sosialisasi dan kurang memberikan dampak signifikan karena minimnya perencanaan dan pendampingan. Kelompok PKK di wilayah ini sebenarnya cukup aktif dan memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga, khususnya melalui keterampilan memasak dan pengolahan pangan khususnya kuliner laut. Keterbatasan wawasan mengenai potensi ekonomi lokal, minimnya akses pelatihan serta tidak adanya pendampingan berkelanjutan menyebabkan potensi tersebut belum berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Gambaran kehidupan sosial di kelurahan Pesawahan mengindikasikan rendahnya literasi perencanaan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan

pembangunan. Arnstein (1969) dalam teori “*Ladder of Citizen Participation*” menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang ideal harus berada pada level kemitraan, sedangkan kondisi di Pesawahan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tahap informatif atau konsultatif yang belum memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan sebagai aktor utama pembangunan. Rendahnya kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan kebutuhan, serta menyusun rencana strategis menyebabkan kebijakan pembangunan cenderung top-down dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Selanjutnya dari aspek ekonomi masyarakat di Kelurahan Pesawahan didominasi oleh kelompok berpendapatan menengah ke bawah dengan mata pencaharian di sektor informal seperti buruh harian, pedagang kecil, dan usaha rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, modal, serta keterampilan kewirausahaan yang memadai. Namun demikian, wilayah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, khususnya dalam sektor kuliner berbasis hasil laut yang didukung oleh keterampilan masyarakat, terutama kelompok perempuan melalui PKK. Namun potensi tersebut belum berkembang secara optimal akibat kurangnya pendampingan, pelatihan, serta perencanaan ekonomi yang terstruktur. Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pengakuan terhadap potensi lokal (*local knowledge*) yang kemudian diperkuat melalui proses pendampingan dan fasilitasi (Chambers, 1997).

Selanjutnya keterkaitan antara kerentanan lingkungan dan keterbatasan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *sustainable development* yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (WCED, 1987). Dalam praktiknya, perencanaan pembangunan di tingkat lokal seringkali belum berbasis data dan partisipasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Studi empiris menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif mampu meningkatkan kualitas kebijakan publik, memperkuat akurasi data, serta meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan (Muluk et al., 2019). Selain itu, penggunaan teknologi pemetaan partisipatif berbasis GIS terbukti dapat meningkatkan kualitas perencanaan spasial serta mempermudah pengambilan keputusan berbasis data (Nirwansyah, 2022). Dari penjabaran diatas maka dapat dikatakan bahwa pendampingan penyusunan perencanaan strategis wilayah berbasis partisipasi dengan dukungan teknologi menjadi solusi inovatif yang tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola pembangunan lokal.

Tujuan

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat Kelurahan Pesawahan sebagai kawasan pesisir dengan tingkat kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyusun perencanaan strategis wilayah berbasis partisipasi yang mampu mengintegrasikan potensi lokal dan analisis kerentanan secara komprehensif. Peningkatan kapasitas tersebut difokuskan pada kemampuan masyarakat dalam melakukan identifikasi masalah dan potensi wilayah secara sistematis, menyusun prioritas pembangunan, serta merumuskan rencana aksi yang realistis dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Hal ini penting mengingat selama ini proses perencanaan di tingkat kelurahan masih cenderung bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara substantif.

Selain itu, tujuan utama kegiatan ini juga menghasilkan dokumen perencanaan strategis wilayah Kelurahan Pesawahan yang berbasis data, partisipatif, dan aplikatif sebagai instrumen formal yang dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dokumen ini tidak hanya memuat analisis potensi dan permasalahan wilayah, tetapi juga mencakup peta sosial-spasial, rencana aksi prioritas, serta strategi pengembangan kawasan produktif yang relevan dengan karakteristik wilayah pesisir. Dengan demikian, kegiatan ini secara konkret bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan melalui penyediaan dokumen perencanaan yang legitimate, terukur, dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah kelurahan maupun pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat, khususnya kelompok perempuan, PKK, dan pelaku usaha mikro, dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya yang tersedia di wilayah pesisir. Penguatan ini dilakukan melalui proses pendampingan yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis kewirausahaan, tetapi juga pada kemampuan perencanaan usaha, pengelolaan sumber daya, serta pengembangan jejaring ekonomi lokal.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis dan operasional untuk memastikan ketercapaian tujuan secara terukur, partisipatif, dan berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Program ini diselenggarakan oleh tim dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi Universitas Bandar Lampung melalui skema pengabdian berbasis kemitraan masyarakat, dengan model kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah kelurahan, masyarakat, akademisi, serta dukungan jejaring stakeholder lokal. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR), di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam seluruh proses kegiatan.

Tahap persiapan diawali dengan kegiatan pra-survei dan observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting wilayah, potensi, serta permasalahan utama yang dihadapi masyarakat. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data awal melalui wawancara semi-terstruktur dengan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, serta kelompok masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap data sekunder seperti profil kelurahan, data kependudukan, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya dilakukan koordinasi awal dengan pihak kelurahan untuk menyepakati jadwal kegiatan, penentuan lokasi pelatihan, serta mobilisasi peserta. Tahap persiapan ini bertujuan memastikan kesiapan teknis, sosial, dan administratif sebelum program diimplementasikan.

Tahap pelaksanaan kegiatan merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang terdiri atas beberapa sub-tahapan terintegrasi. Pertama, kegiatan sosialisasi program dalam bentuk forum warga yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan alur kegiatan. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga yang melibatkan RT/RW, PKK, karang taruna, dan tokoh masyarakat. Kedua, pelaksanaan pelatihan perencanaan partisipatif yang mencakup teknik identifikasi masalah, pemetaan potensi wilayah, analisis kebutuhan, serta penyusunan rencana aksi. Metode pelatihan menggunakan pendekatan andragogi melalui diskusi kelompok, simulasi, dan praktik langsung. Ketiga, pelaksanaan pemetaan sosial-spasial berbasis komunitas menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan dukungan

teknologi sederhana seperti QGIS dan Google My Maps untuk menghasilkan peta potensi dan kerentanan wilayah. Jumlah partisipan dalam kegiatan ini berkisar antara 30–50 orang yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: (1) perwakilan RT/RW, (2) anggota PKK, (3) karang taruna, (4) pelaku UMKM lokal, dan (5) tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam komunitas. Kriteria partisipan juga mempertimbangkan aspek inklusivitas, terutama keterlibatan perempuan dan kelompok rentan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil perencanaan yang disusun benar-benar merepresentasikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan, peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk mempermudah diskusi dan pemetaan secara partisipatif.

Metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk menghasilkan output berupa dokumen perencanaan, tetapi juga untuk menciptakan proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang memperkuat kapasitas kolektif masyarakat. Pendekatan partisipatif yang digunakan memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan memiliki legitimasi sosial dan relevansi kontekstual, sehingga hasil program dapat diimplementasikan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan. Dengan desain metode yang komprehensif dan terukur ini, kegiatan pengabdian diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan wilayah pesisir yang inklusif dan adaptif.

Hasil

Pelaksanaan Identifikasi Permasalahan dan Potensi Wilayah Secara Partisipatif

Tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan melalui serangkaian observasi lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perangkat kelurahan, pengurus RT/RW serta kelompok masyarakat setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi wilayah yang menjadi dasar penyusunan perencanaan strategis berbasis partisipasi. Pada pelaksanaan FGD, peserta dibagi dalam beberapa kelompok diskusi untuk memetakan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang mereka hadapi sehari-hari. Melalui proses diskusi tersebut, masyarakat secara aktif menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian utama, seperti kondisi drainase yang kurang memadai, keterbatasan fasilitas sanitasi, banjir rob yang terjadi secara berkala, serta permasalahan pengelolaan sampah lingkungan. Selain mengidentifikasi masalah, peserta juga diminta menginventarisasi berbagai aset dan potensi yang dimiliki wilayahnya. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengenali berbagai potensi lokal yang sebelumnya belum terdokumentasikan secara sistematis, seperti potensi wisata pelabuhan, usaha kuliner berbasis hasil laut, serta pemanfaatan lahan kosong untuk kegiatan pertanian komunitas. Seluruh hasil identifikasi kemudian dituangkan dalam peta masalah dan peta potensi wilayah yang disusun secara bersama-sama oleh peserta dan tim pendamping. Proses ini menghasilkan basis data awal yang digunakan sebagai bahan penyusunan rencana aksi pembangunan wilayah.

Pendampingan Pemetaan Kerentanan Wilayah Pesisir

Kegiatan berikutnya difokuskan pada pendampingan pemetaan kerentanan wilayah pesisir yang dilakukan secara partisipatif. Dalam kegiatan ini, tim pengabdian memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap banjir rob dan banjir musiman. Peserta diajak menggambarkan kondisi wilayah mereka melalui peta sketsa yang memuat lokasi permukiman, jaringan jalan, fasilitas umum, saluran drainase,

dan titik-titik genangan air yang sering terjadi saat musim hujan maupun pasang laut. Melalui proses pemetaan tersebut, masyarakat berhasil mengidentifikasi bahwa beberapa titik permukiman mengalami genangan rutin dengan frekuensi yang cukup tinggi. Selain itu, peserta juga mengidentifikasi berbagai faktor penyebab banjir seperti sedimentasi saluran drainase, bangunan yang berdiri di atas saluran air, serta kondisi geografis wilayah yang merupakan bekas kawasan pesisir. Selama kegiatan berlangsung, masyarakat secara aktif berdiskusi mengenai pengalaman mereka menghadapi banjir dan berbagai upaya adaptasi yang selama ini dilakukan secara mandiri. Hasil pemetaan kemudian diverifikasi melalui observasi lapangan bersama tim pengabdian untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan kondisi aktual di lapangan. Output dari kegiatan ini berupa peta sosial spasial yang menjadi salah satu dokumen penting dalam penyusunan perencanaan strategis kelurahan.

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Perencanaan Strategis Wilayah

Setelah proses identifikasi masalah dan pemetaan wilayah selesai dilakukan, tim pengabdian melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan strategis wilayah melalui Forum Warga Pesawahan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep perencanaan pembangunan berbasis partisipasi serta pentingnya keterlibatan warga dalam menentukan arah pembangunan lingkungan mereka. Materi yang diberikan meliputi identifikasi masalah, analisis potensi, penentuan prioritas program, melalui pemaparan *best practice* dari daerah-daerah yang telah berhasil membangun dan memberdayakan masyarakatnya. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyusun secara langsung daftar kebutuhan dan prioritas pembangunan yang diinginkan. Metode diskusi kelompok digunakan untuk memastikan seluruh peserta dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara setara. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mampu menyusun daftar prioritas pembangunan yang lebih terstruktur dibandingkan sebelum pendampingan dilakukan. Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya penggunaan data dan informasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Sebagai bagian dari penyusunan strategi pembangunan wilayah, tim pengabdian juga melakukan pendampingan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kegiatan ini dilaksanakan melalui diskusi tematik yang melibatkan kelompok perempuan, pelaku usaha mikro, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dalam kegiatan ekonomi produktif. Dalam diskusi tersebut, peserta diminta mengidentifikasi usaha-usaha yang pernah berkembang maupun peluang usaha yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya minat yang cukup tinggi dari masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis kuliner, produk olahan hasil laut, dan usaha rumah tangga lainnya. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan berbagai kendala yang selama ini dihadapi, terutama terkait permodalan, pemasaran, dan akses pelatihan usaha. Tim pengabdian kemudian memfasilitasi proses penyusunan rencana pengembangan ekonomi yang akan terintegrasi dengan dokumen perencanaan wilayah. Beberapa kelompok masyarakat juga mulai mengidentifikasi kebutuhan pembentukan kelembagaan ekonomi yang dapat mendukung keberlanjutan usaha. Melalui kegiatan ini masyarakat tidak hanya mengenali potensi ekonomi yang dimiliki, tetapi juga mampu merumuskan langkah-langkah pengembangannya secara lebih sistematis.

Penyusunan Rencana Pengembangan Wisata Berbasis Komunitas

Kegiatan pengabdian juga menghasilkan proses perencanaan pengembangan wisata berbasis komunitas yang dilakukan melalui diskusi dan pemetaan potensi wilayah. Tim pengabdian memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memiliki peluang dikembangkan menjadi destinasi wisata lokal. Dalam proses ini, area pelabuhan menjadi salah satu lokasi yang paling banyak diusulkan oleh masyarakat karena memiliki nilai strategis dan potensi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu muncul juga gagasan pengembangan kampung warna-warni sebagai upaya meningkatkan daya tarik kawasan permukiman. Masyarakat secara aktif mendiskusikan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mewujudkan gagasan tersebut, mulai dari penataan lingkungan, peningkatan fasilitas umum, hingga pengembangan aktivitas UMKM pendukung wisata. Seluruh usulan kemudian dirangkum dalam bentuk rencana pengembangan kawasan yang akan menjadi bagian dari dokumen perencanaan strategis wilayah. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat mampu berpartisipasi secara aktif dalam merumuskan visi pembangunan kawasan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Kegiatan tersebut juga menghasilkan daftar kebutuhan dan tahapan implementasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan wisata berbasis komunitas pada masa mendatang.

Penyusunan Rencana Aksi dan Pembentukan Komitmen Bersama

Tahap akhir kegiatan pengabdian difokuskan pada penyusunan rencana aksi bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan lokal. Dalam kegiatan ini, masyarakat bersama tim pendamping melakukan daftar prioritas program berdasarkan tingkat urgensi, manfaat dan kemampuan pelaksanaan di tingkat komunitas. Hasil diskusi menunjukkan bahwa masyarakat menetapkan beberapa program prioritas, antara lain perbaikan drainase lingkungan, penghijauan kawasan, pengembangan UMKM dan pemanfaatan lahan kosong untuk ruang publik. Selain menetapkan program prioritas peserta juga menyepakati pembagian peran dan tanggung jawab untuk setiap bidang kegiatan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk rencana aksi yang memuat target kegiatan, pelaksana, serta langkah tindak lanjut yang akan dilakukan setelah program pengabdian berakhir. Melalui proses ini, masyarakat tidak hanya memperoleh dokumen perencanaan, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk melaksanakan program yang telah disepakati. Hasil akhir kegiatan berupa dokumen perencanaan strategis wilayah berbasis partisipasi yang memuat analisis potensi, kerentanan, prioritas pembangunan dan rencana aksi masyarakat sebagai dasar pengembangan wilayah Kelurahan Pesawahan secara berkelanjutan.

Hasil Pendampingan

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian setiap tahapan kegiatan yang telah direncanakan, meliputi keterlibatan peserta, keberhasilan identifikasi potensi dan permasalahan wilayah, penyusunan peta partisipatif, serta penyusunan dokumen rencana aksi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh tahapan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memperoleh partisipasi aktif dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya terlihat pada kehadiran selama kegiatan berlangsung, tetapi juga pada kontribusi peserta dalam proses diskusi, pemetaan wilayah, penyusunan prioritas pembangunan, serta perumusan rencana aksi. Selama proses pendampingan, masyarakat mampu menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, mengidentifikasi potensi lokal yang dimiliki, serta menyusun

alternatif solusi yang disepakati secara bersama. Proses tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mendorong masyarakat untuk berperan sebagai aktor utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan wilayah. Selain menghasilkan berbagai output kegiatan, proses pendampingan juga membangun komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah kelurahan untuk menjadikan dokumen yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan pada tingkat kelurahan.

Hasil pendampingan juga menghasilkan peta partisipatif yang menggambarkan potensi wilayah dan tingkat kerentanan kawasan pesisir. Selain itu, masyarakat berhasil menyepakati beberapa program prioritas pembangunan, yaitu perbaikan drainase lingkungan, penataan kawasan permukiman, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, pengembangan wisata berbasis komunitas, serta penguatan pengelolaan lingkungan. Seluruh hasil tersebut kemudian dihimpun menjadi satu dokumen Rencana Aksi Wilayah Berbasis Partisipasi yang memuat analisis kondisi eksisting, potensi wilayah, kerentanan kawasan pesisir, prioritas pembangunan, serta rencana aksi masyarakat. Dokumen ini disusun sebagai dasar penyusunan usulan pembangunan pada tingkat kelurahan dan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kelurahan maupun pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan.

Diskusi

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sebelum intervensi dilakukan, kapasitas masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan masih terbatas, ditandai dengan rendahnya literasi perencanaan dan belum tersusunnya dokumen perencanaan berbasis partisipasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan klasik (Arnstein, 1969) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali berada pada tingkat tokenism, di mana masyarakat hanya dilibatkan secara simbolik tanpa memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Namun, melalui kegiatan pendampingan, terlihat adanya perubahan pola keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam proses identifikasi masalah, pemetaan potensi, hingga penyusunan rencana aksi. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran menuju level partisipasi yang lebih substantif. Temuan ini juga sejalan dengan studi Muluk et al., (2019) yang menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif mampu meningkatkan kualitas formulasi kebijakan pembangunan daerah serta memperkuat legitimasi sosial kebijakan. Selain itu, pendekatan *participatory planning* yang diterapkan dalam kegiatan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan. Hal ini penting karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi risiko banjir rob yang terjadi secara berkala dengan karakteristik unik, yaitu air yang meresap dari dalam tanah dan muncul melalui lantai rumah. Kondisi ini memperlihatkan kompleksitas kerentanan wilayah pesisir yang tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti kenaikan muka air laut, tetapi juga oleh kondisi geomorfologi wilayah. Temuan ini sejalan dengan konsep kerentanan yang dikemukakan oleh Adger (2006), yang menekankan bahwa kerentanan merupakan hasil interaksi antara paparan risiko, sensitivitas, dan kapasitas adaptif masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Pesawahan memiliki paparan risiko yang tinggi, namun kapasitas adaptif yang masih terbatas. Pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan ini, baru pada tataran pemetaan wilayah atau zona rawan banjir. Berdasarkan pemetaan ini maka direkomendasikan pelatihan mitigasi

dan adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir. Hal tersebut dapat menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Nirwansyah (2022) yang menyatakan bahwa pemetaan partisipatif mampu meningkatkan kemampuan spasial masyarakat dalam mengenali risiko bencana dan merancang strategi adaptasi. Selain itu, (UN-Habitat) menegaskan bahwa pembangunan kota berkelanjutan di kawasan pesisir harus mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Masyarakat kelurahan Pesawahan memiliki tingkat kohesi sosial yang tinggi, ditandai dengan hubungan sosial yang harmonis, budaya gotong royong dan tingkat keamanan lingkungan yang relatif baik. Modal sosial ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan pengabdian, khususnya dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial, yang mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan sosial, merupakan elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas institusi dan pembangunan masyarakat. Dalam konteks pengabdian ini, keberadaan modal sosial mempermudah proses mobilisasi masyarakat dan pelaksanaan kegiatan berbasis kelompok seperti FGD dan pemetaan partisipatif. Temuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki keterbatasan dalam aspek ekonomi dan infrastruktur, kekuatan sosial yang dimiliki dapat menjadi modal utama dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan Chambers (1997) yang menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan yang berbasis pada potensi lokal dan kekuatan komunitas.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, terutama dalam sektor kuliner dan usaha rumah tangga, namun belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan modal, pemasaran, dan kapasitas manajerial. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmawati et al., (2024) yang menyatakan bahwa UMKM perempuan di Indonesia sering menghadapi kendala dalam akses permodalan dan literasi keuangan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi digital juga menjadi hambatan dalam pengembangan usaha. Pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Hal ini didukung oleh teori pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Sen (1999), yang menekankan bahwa pembangunan harus berfokus pada peningkatan kapabilitas individu untuk mengakses peluang ekonomi. Selain itu, konsep *local economic development* (LED) juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan (Blakely & Leigh, 2013). Penggunaan teknologi pemetaan partisipatif berbasis QGIS dan metode PRA dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana dapat meningkatkan kualitas perencanaan wilayah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengidentifikasi titik risiko, potensi wilayah, serta prioritas pembangunan secara lebih sistematis. Hal ini sejalan dengan penelitian Hamzah et al., (2025) yang menyatakan bahwa pemetaan partisipatif berbasis GIS dapat meningkatkan akurasi data spasial dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, teknologi ini juga meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data bagi masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan, keberadaan data spasial yang akurat sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Temuan ini juga didukung oleh Goodchild, (2007) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data geografis dapat meningkatkan kualitas data dan relevansi kebijakan.

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik benang merah terhadap hasil pengabdian yang dilakukan bahwa integrasi antara perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dapat menghasilkan model perencanaan strategis wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan konsep *sustainable development* yang dikemukakan oleh WCED (1987), yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 11, SDG 8, dan SDG 5. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mampu menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga mulai mengembangkan inisiatif lokal dalam berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian berbasis partisipasi dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong pembangunan berbasis komunitas.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Pesawahan Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan strategis wilayah berbasis partisipasi mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan lokal. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki berbagai potensi sosial dan ekonomi yang sebelumnya belum teridentifikasi secara sistematis, seperti kekuatan modal sosial, potensi UMKM berbasis kuliner, serta peluang pengembangan wisata berbasis komunitas. Di sisi lain, wilayah ini juga memiliki tingkat kerentanan lingkungan yang tinggi, terutama terhadap banjir rob dan keterbatasan infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Melalui kegiatan pemetaan partisipatif, forum diskusi kelompok, pelatihan, dan pendampingan, masyarakat mulai mampu mengidentifikasi prioritas pembangunan secara lebih terarah dan berbasis kebutuhan lokal. Hasil kegiatan juga menunjukkan tersusunnya berbagai data sosial-spasial dan rencana aksi masyarakat yang dapat menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kelurahan.

Kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan partisipatif memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir perkotaan. Keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi masalah, penyusunan rencana aksi dan pengembangan program lingkungan maupun ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama pembangunan. Selain menghasilkan dokumen dan peta partisipatif, kegiatan ini juga memperkuat jejaring sosial masyarakat serta membuka peluang pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Penggunaan teknologi sederhana seperti pemetaan berbasis GIS dan pendekatan FGD tematik turut membantu meningkatkan kualitas data dan akurasi identifikasi kebutuhan masyarakat. Model pengabdian ini dapat menjadi alternatif pendekatan pembangunan wilayah pesisir yang integratif, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial, ekonomi, serta lingkungan.

Daftar Pustaka

1. (UN-Habitat), U. N. H. S. P. (n.d.). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*. Nairobi: UN-Habitat.
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/10/wcr_2020_report.pdf
2. Adger, W. N. (2006). Vulnerability. *Global Environmental Change*, 16(3), 268–281.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006>

3. Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
4. Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. SAGE Publications.
5. Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
6. Goodchild, M. F. (2007). Citizens as Sensors: The World of Volunteered Geography. *GeoJournal*, 69(4), 211–221. <https://doi.org/10.1007/s10708-007-9111-y>
7. Hamzah, A., Pratama, S., & Sari, M. (2025). Pemetaan partisipatif web-GIS pada lahan pertanian untuk mendukung pengelolaan dan perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 33–42.
8. Lampung, B. P. S. P. (2024). *Provinsi Lampung Dalam Angka 2024*. BPS Provinsi Lampung.
9. Muluk, M. R. K., Danar, O. R., & Rahmawati, L. (2019). Community Participation and Development Planning in Local Government Level: A Study on the Formulation of Batu City Medium-Term Development Plan. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 26(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i3.11145>
10. Nirwansyah, A. W. (2022). Peningkatan Kemampuan Spasial Kebencanaan Masyarakat Pesisir Melalui Kegiatan Pemetaan Partisipatif. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 6, 85–91. <https://doi.org/10.30595/pssh.v6i.446>
11. Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
12. Rahmawati, A., Pienrasmi, H., Denu Poyo, M., & Eka Nanda, S. P. (2024). Peran Pentahelix di Pasar Kreatif Payungi Kota Metro dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) pada Pilar Pembangunan Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(6), 2472–2484.
13. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.
14. World Commission on Environment and Development (WCED). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press; 1987.